

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN KAS,
IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN
KETAATAN ATURAN AKUNTANSI TERHADAP FRAUD
PADA PERUSAHAAN BUMN DI KOTA PEKANBARU**

Oleh:

Raja Reno Setiawan

Pembimbing: Nur Azlina dan Julita

Faculty Of Economic University Riau, Pekanbaru, Indonesia

e-mail : rajarenosetiawan@yahoo.co.id

*Effect Of Application Of Internal Control Systems Cash, The Implementation Of
Good Corporate Governance And Compliance Rules Against Fraud In
Accounting Soe In Pekanbaru*

ABSTRACT

The purpose of this study was to Test back relationship with the Treasury Internal Control System Implementation of Good Corporate Governance Fraud. hubungan with Fraud and reexamine relations Accounting Rules Compliance with Fraud. Selected population in this study is the State Owned Enterprises located in the city of Pekanbaru many as 24 state-owned enterprises ..The sample in this study as many as 49. The analysis of research on the use is use multiple linear regression equation with SPSS (Statistical Product and Service Solution). The research hypothesis first hypothesis suggests that the Internal Control of Cash a negative effect on Fraud. The second hypothesis suggests that GCG implementation negatively affect Fraud. Three hypotheses suggests that adherence Accounting Rules negative effect on Fraud. 0375 R2sebesar calculation results. Thus variables can explain the variable implementation of good corporate governance, internal control and compliance time Cash accounting rules take effect at 37.5%. The rest was influenced by other variables that are not observed in this study, such as individual morality, organizational ethics, justice organizations and others.

Keywords : Cash Internal Control System, Implementation of Good Corporate Governance, Compliance Rules Accounting and Fraud

PENDAHULUAN

BUMN merupakan bentuk usaha korporasi yang didirikan dengan tujuan utama menjalankan fungsi pemerintahan yaitu agen bagi pembangunan ekonomi. BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian

nasional. BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan melihat tujuan tersebut, agar dapat mengoptimalkan peran BUMN, pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional.

Perkembangan ilmu akuntansi, selain memberikan manfaat juga menjadi salah satu sumber masalah. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah adanya kecurangan (*Fraud*). Laporan keuangan merupakan salah satu bagian yang rentan terhadap perilaku kecurangan. Padahal, laporan keuangan merupakan sumber informasi penting dalam organisasi. Ikatan Akuntan Indonesia (2012) mendefinisikan kecurangan sebagai (1) salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, (2) salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Berdasarkan Fenomena yang kita lihat yaitu kasus suap PON yang melibatkan beberapa BUMN pada venue menembak PON XVIII Riau. BUMN yang terlibat adalah PT. Pembangunan Perumahan (PP) Persero, PT. Adhi Karya dan PT Wijaya Karya yang merugikan negara sebesar 900 juta rupiah. (<http://www.riapos.co/>)

Selanjutnya Polda Riau menemukan adanya korupsi pada pengadaan lahan untuk perumahan karyawan PTPN V Pekanbaru di Jalan Soekarno Hatta, Pekanbaru. Dalam perjalanannya, kasus ini berawal pada tahun 2000 hingga pencairan terakhir tahun 2006, diduga telah menelan uang negara hingga Rp

15 miliar. Pembangunan rumah karyawan yang dilakukan secara bertahap sejak tahun 2000, oleh Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) PTP Nusantara V di Jalan Soekarno Hatta, Pekanbaru sampai sekarang tidak kunjung jelas proyek pengerjaannya.

(<http://riauterkini.com/hukum.php?arr=65303>
<http://riauterkini.com/hukum.php?arr=65303>
posted on 7 Oktober 2013, 15.54)

Pengendalian internal mempunyai pengaruh dalam upaya pencegahan kecurangan. Pengendalian intern merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan keyakinan yang cukup akan tercapainya tujuan perusahaan. Menurut Mulyadi (2006;180), tujuan pengendalian intern adalah untuk menyediakan jaminan yang layak mengenai pencapaian dari sasaran manajemen dalam kategori sebagai berikut. (1) keandalan laporan keuangan, (2) efektivitas dan efisiensi dari operasional, (3) ketaatan pada hukum dan peraturan. Walaupun terdapat perbedaan pengendalian intern yang diterapkan pada masing-masing perusahaan, tetapi unsur-unsur yang mendasarinya harus sama.

Faktor lain yang dapat mencegah terjadinya kecurangan, diantaranya yaitu penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Menurut Eddi (2004) *good corporate governance* adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan meningkatkan nilai pemegang saham (*shareholders value*) serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan.

Dan faktor Selain implementasi *good corporate governance* (gcg) dan pengendalian intern faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya kecurangan

(*Fraud*) adalah ketaatan terhadap aturan akuntansi. Standar akuntansi seringkali dijadikan alasan pembenaran (rasionalisasi) oleh para pelaku kecurangan (*Fraud*). Laporan keuangan merupakan bagian yang paling rentan terhadap perilaku kecurangan. Pada dasarnya standar akuntansi dibuat selain bertujuan untuk menyeragamkan format laporan, juga bertujuan untuk mempermudah pemeriksaan. Wilopo (2006) menyatakan bahwa manajemen perusahaan harus melaksanakan aturan akuntansi untuk mengatasi permasalahan keagenan. Hal ini didukung pernyataan Kusumastuti (2012) yang menyatakan bahwa jika manajemen perusahaan tidak melaksanakan aturan akuntansi yang benar, maka kredibilitas informasi pada laporan keuangan tidak akan tercapai. Hasil penelitian Purnamasari (2015) ketaatan aturan akuntansi secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap *Fraud*.

Husna (2013) meneliti tentang Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Kas dan Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Kecurangan (Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN Di Kota Padang). Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan sistem pengendalian intern kas dan implementasi *Good Corporate Governance* secara simultan berpengaruh terhadap kecurangan.

Penelitian ini replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Husna (2014) penelitian yang dilakukan Pada Perusahaan BUMN Di Kota Padang. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengetahui apakah akan diperoleh hasil yang sama apabila penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru karena

berdasarkan fenomena adanya kecurangan yang dilakukan oleh BUMN di Kota Pekanbaru, dengan menambahkan variabel ketaatan aturan akuntansi sebagai variabel independen. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang adalah terletak pada objek penelitian dan variabel ketaatan aturan akuntansi, kemudian penelitian terdahulu meneliti di BUMN di Kota Padang, sedangkan penelitian sekarang pada BUMN yang ada dilingkungan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 1) Apakah terdapat hubungan Sistem Pengendalian Intern Kas dengan *Fraud*. 2) Apakah terdapat hubungan Implementasi *Good Corporate Governance* dengan *Fraud*. 3) Apakah terdapat hubungan Ketaatan Aturan Akuntansi dengan *Fraud*.

Berdasarkan uraian diatas dan rumusan pernyataan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 1) Menguji kembali hubungan Sistem Pengendalian Intern Kas dengan *Fraud*. 2) Menguji kembali hubungan Implementasi *Good Corporate Governance* dengan *Fraud*. 3) Menguji kembali hubungan Ketaatan Aturan Akuntansi dengan *Fraud* (Kecurangan).

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 1) Bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), dan Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap *Fraud* (Kecurangan) pada Perusahaan BUMN di Kota Pekanbaru. 2) Bagi Pihak Organisasi atau Perusahaan

BUMN di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan berkaitan dengan Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Implementasi *Good Corporate Governance*(GCG), dan Ketaatan Aturan Akuntansi dalam mengurangi tingkat kecurangan (*Fraud*). 3) Menyediakan informasi yang diperlukan untuk penelitian dibidang akuntansi sektor publik pada masa yang akan datang. 4) Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk para manajer perusahaan berkomunikasi yang baik terhadap para pekerjanya. 5) Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan rujukan bagi penelitian selanjutnya serta sebagai pertimbangan bagi organisasi yang menghadapi masalah yang serupa. 6) Hasil penelitian ini diharapkan akan melengkapi bahan penelitian selanjutnya dalam rangka menambah khasanah akademik sehingga berguna untuk pengembangan ilmu.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Kecurangan (*Fraud*)

Menurut Boynton (1996) dalam Kurniawati (2012), kecurangan atau *Fraud* adalah penipuan yang direncanakan misalnya salah saji, menyembunyikan, atau tidak mengungkapkan fakta yang material sehingga merugikan pihak lain. *Statement on Auditing Standards* No. 99 mendefinisikan *Fraud* sebagai “*an intentional act that result in a material misstatement in financial statements tahtare the subject o an audit.*”

Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary* dalam Kurniawati (2012), *Fraud* didefinisikan sebagai. Mencakup semua macam yang dapat dipikirkan manusia, dan yang dapat

diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau pemaksaan kebenaran, dan mencakup semua cara yang tak terduga, penuh siasat licik atau tersembunyi, dan setiap cara yang tidak wajar yang menyebabkan orang lain tertipu.

Definisi *Fraud* juga diungkapkan menurut the *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* dalam Kurniawati (2012). Perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.

Jadi, kecurangan merupakan suatu hal yang di sengaja oleh pelakunya. Hal tersebut lah yang membedakan antara kecurangan dan kesalahan. Selain itu, kecurangan dilakukan dengan melanggar ketentuan yang berlaku untuk mengambil keuntungan demi dirinya sendiri.

Fraud pada Sektor Pemerintahan

Menurut Pristiyanti (2012) semua jenis *Fraud* dapat terjadi pada sektor pemerintahan, akan tetapi yang paling sering terjadi adalah korupsi. Korupsi berasal dari bahasa latin, *Corruptio-Corruptere* yang artinya busuk, rusak, mengenyahkan, memutar balik atau menyogok. Secara harfiah korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politisi ataupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan

publik yang dipercayakan kepada mereka.

Skema *Fraud* (kecurangan) yang terjadi dientitas pemerintah cukup banyak dan beragam, dari sumber BPKP (2004) dalam Sukanto (2007) menjabarkan secara rinci tindak kecurangan dalam APBN maupun APBD, dari segi pengeluaran maupun pemasukan. Rangkumannya adalah sebagai berikut. Dari segi penerimaan. 1) Rendahnya anggaran penerimaan pajak, PBB, Bea Cukai, retribusi dan pajak lainnya dibanding potensi yang tersedia. 2) Manipulasi restitusi pajak. 3) Laporan SPT pajak bulanan maupun tahunan yang tidak sesuai dengan potensi pajak yang sesungguhnya. 4) Kesalahan pengenaan tarif pajak maupun bea. 5) Pembebasan pajak atas bahan baku impor tujuan ekspor tidak sesuai data sesungguhnya. 6) Perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat/daerah memperkecil data volume produksi pertambangan atau hasil alam. 7) Memperbesar biaya *cost recovery*, sehingga setoran hasil menjadi berkurang. 8) Kontrak pembagian hasil atas tambang yang merugikan negara. 9) Penjualan aset pemerintah tidak berdasar harga wajar atau harga pasar. 10) Pelaksanaan tukar guling (*ruislaag*) yang merugikan negara dan pemanfaatan tanah negara yang harga sewanya tidak wajar (dibawah pasar). 11) Penerimaan yang seharusnya masuk kerekening kas negara, namun masuk kerekening atas nama pejabat atau perorangan, meskipun pejabat tersebut pimpinan instansi yang bersangkutan, namun cara ini berpotensi merugikan negara.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Kas

Menurut PP No. 8 Tahun 2006 dalam Adelin (2013;6) pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian laporan keuangan, sedangkan menurut Abdul Halim (2003;197) struktur pengendalian internal merupakan rangkaian proses yang dijalankan entitas, yang mana proses tersebut mencakup berbagai kebijakan dan prosedur sistematis, bervariasi dan memiliki tujuan utama. 1) Menjaga keandalan pelaporan keuangan entitas. 2) Menjaga efektif dan efisiensi operasi yang dijalankan. 3) Menjaga kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku.

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa keefektifan pengendalian internal adalah keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan instansi yang berkaitan dengan menjaga keandalan penyajian laporan keuangan, efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keefektifan pengendalian internal dapat berperan dalam mencegah dan mendeteksi suatu kecurangan akuntansi (*Fraud*) dalam suatu instansi.

Implementasi Good Corporate Governance

Sukrisno Agoes (2009) mendefinisikan bahwa tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, Pemegang Saham, dan

pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya dan penilaian kinerjanya.

Good Corporate Governance (GCG) menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) adalah salah satu pilar dari system ekonomi pasar. *Corporate Governance* berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu Negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan.

Organizations for Economic Cooperation and Development (OECD) menyatakan bahwa *Good corporate governance* sebagai suatu struktur yang terdiri atas para pemegang saham, direktur, manajer, seperangkat tujuan yang ingin dicapai perusahaan, dan alat-alat yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan memantau kinerja (Tjager dkk dalam Sukrisno Agoes, 2009).

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat diketahui bahwa *good corporate governance* merupakan suatu sistem tata kelola perusahaan yang baik guna mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk mencegah timbulnya kecurangan atau kesalahan dari pihak manajemen yang dapat merugikan komisaris, investor, kreditur, pemerintah dan masyarakat serta pihak-pihak berkepentingan lainnya.

Ketaatan Aturan Akuntansi

Ketaatan adalah suatu sikap patuh kepada aturan atau perintah, sedangkan aturan adalah cara atau tindakan yang telah ditetapkan yang harus dijalankan atau dituruti. Di dalam suatu instansi terdapat dasar atau pedoman yang digunakan manajemen dalam menentukan dan melaksanakan jalannya berbagai kegiatan didalam perusahaan salah satunya adalah aturan mengenai kegiatan akuntansi.

Menurut Rahmawati (2012:9) aturan akuntansi dibuat sedemikian rupa sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam standar akuntansi terdapat aturan-aturan yang harus digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan yang berpedoman terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Dengan demikian Ketaatan Aturan Akuntansi merupakan suatu kewajiban dalam organisasi untuk mematuhi segala ketentuan atau aturan akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan agar tercipta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan laporan keuangan yang dihasilkan efektif, handal serta akurat informasinya. Adanya aturan akuntansi tersebut menghindari tindakan yang menyimpang yang dapat merugikan organisasi. Laporan keuangan berkaitan dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti manajemen dan investor. Apabila laporan keuangan yang dibuat tidak sesuai atau tanpa mengikuti aturan akuntansi yang berlaku maka keadaan tersebut dapat menumbuhkan perilaku tidak etis dan memicu terjadinya kecurangan akuntansi di mana hal

tersebut akan menyulitkan auditor untuk menelusurinya.

PP RI Nomor 24/2005 menjelaskan mengenai aturan yang digunakan dalam kegiatan akuntansi adalah standar akuntansi keuangan. Ketaatan aturan akuntansi dipandang sebagai tingkat kesesuaian prosedur pengelolaan aset organisasi, pelaksanaan prosedur akuntansi, dan penyajian laporan keuangan beserta semua bukti pendukungnya. Dengan aturan yang sudah ditentukan oleh BPK dan/atau SAP. Dinyatakan mentaati aturan akuntansi jika PTN telah menerapkan persyaratan pengungkapan, menyajikan informasi yang bermanfaat bagi kepentingan publik, objektif, memenuhi syarat kehati-hatian dan memenuhi konsep konsistensi penyajian (PSAK no. 1, IAI, 2004).

PP RI nomor 24, 2005 tentang SAP dalam Thoyibatun (2009) menyebutkan bahwa persyaratan pengungkapan pada setiap entitas akuntansi dilingkungan pemerintah diharapkan menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas laporan keuangan dan laporan kinerja. Laporan keuangan terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, sedangkan laporan kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.

Laporan-laporan tersebut dibuat dalam bentuk dan harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam SAP agar kinerja organisasi antar periode dapat dibandingkan.

Konsep konsisten penyajian menjelaskan bahwa penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan

keuangan dan laporan kinerja antar periode konsisten sesuai, yaitu sesuai lampiran 3 dan 4 SAP (PP RI nomor 24, 2005).

Jika dilakukan perubahan penyajian laporan keuangan, maka entitas mereklasifikasi, informasi komparatif sesuai dengan paragraf 39 dan 40. Misalnya ketika suatu akuisisi atau pelepasan yang signifikan atau review atas penyajian laporan keuangan, mungkin akan menghasilkan kesimpulan bahwa laporan keuangan harus disajikan secara berbeda (PSAK no. 1, IAI, 2009).

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

A. Hubungan Sistem Pengendalian Intern Kas dengan *Fraud*

Menurut teori Tunggal (2012;231) yang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang melaksanakan pengendalian intern akan mempermudah mengecek kecurangan yang terjadisehingga dapat mendeteksi kecurangan secara dini.

Teori atribusi menjelaskan bahwa tindakan seorang pemimpin maupun orang yang diberikan wewenang dipengaruhi oleh atribut penyebab antara lain terdiri dari kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal (*eksternal forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan.

Senada dengan penelitian Fitriatil Husna (2013) yang menyatakan bahwa pengendalian internal atas kas mempunyai

pengaruh dalam upaya pencegahan kecurangan.

Pengendalian dan prosedur yang tidak berjalan dengan baik akan memberikan kesempatan bagi pegawai yang terlibat dalam kegiatan operasional untuk melakukan kecurangan. Sehingga diduga terdapat hubungan negatif antara pengendalian intern kas terhadap *Fraud* dengan menarik hipotesis sebagai berikut.

H₁: Terdapat Hubungan Negatif Antara Penerapan Sistem Pengendalian Intern Kas dengan *Fraud*

B. Hubungan Implementasi *Good Corporate Governance* dengan *Fraud*

Tjager (2003;4) dalam Sukirno Agoes (2009) yang menyatakan bahwa praktik GCG dapat meningkatkan nilai (valuation) perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan umumnya GCG dapat meningkatkan kepercayaan investor. Hasil penelitian ini juga didukung oleh data dari distribusi frekuensi dari variabel *Good Corporate Governance* yang memiliki rerata 81,79 dengan kategori sangat baik, yang mengindikasikan kecurangan dapat dikurangi dengan menjalankan *good corporate governance* dalam perusahaan.

Berkeadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis, dan saling keterkaitan. Prinsip tersebut dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan secara keseluruhan karena penerapan *Good Corporate Governance* yang berjalan dengan baik akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang jauh dari

praktik kecurangan. Sesuai dengan penelitian Fitriatil Husna (2013) yang menyebutkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* juga membuat pengelolaan perusahaan menjadi lebih fokus dan lebih jelas dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan pengawasannya. Sehingga diduga terdapat hubungan negatif antara implementasi *Good Corporate Governance* terhadap *Fraud*, dengan menarik hipotesis sebagai berikut.

H₂: Terdapat Hubungan Negatif Antara Implementasi *Good Corporate Governance* dengan *Fraud*

C. Hubungan Ketaatan Aturan Akuntansi Kas dengan *Fraud*

Menurut Rahmawati (2012;9) aturan akuntansi dibuat sedemikian rupa sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam standar akuntansi terdapat aturan-aturan yang harus digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan yang berpedoman terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Dengan demikian Ketaatan Aturan Akuntansi merupakan suatu kewajiban dalam organisasi untuk mematuhi segala ketentuan atau aturan akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan agar tercipta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan laporan keuangan yang dihasilkan efektif, handal serta akurat informasinya. Adanya aturan akuntansi tersebut menghindari tindakan yang menyimpang yang dapat merugikan organisasi. Laporan keuangan berkaitan dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti manajemen dan investor.

Penelitian Shintadevi(2015) menunjukkan terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap *Fraud*.Maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut.

H₃: Terdapat Hubungan Negatif Antara Ketaatan Aturan Akuntansi dengan *Fraud*

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di Kota Pekanbaru. Dilakukan pada bulan Juli 2015 sampai dengan selesai, dengan jumlah sampel 24 perusahaan yang dapat dilihat pada tabel populasi dan sampel.

Populasi menurut Sugiyono (2012;72) merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Negara yang terdapat di Kota Pekanbaru sebanyak 24 BUMN.

Sampel adalah sekumpulan unit observasi (sebagai elemen populasi) yang diperoleh karena adanya sampling.Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemlihan sampel bertujuan (*purposive sampling method*) dengan adanya kriteria sampel yang harus dipenuhi.

Ada dua metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data primer yaitu (1) metode survey, (2) metode observasi dan yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan menggunakan kuesioner, dalam penelitian ini peneliti mengirimkan daftar kuesioner

yang bekerja pada posisi yang berbeda-beda didalam organisasinya masing-masing. Mereka berada pada posisi . Kepala BUMN, Sekretaris BUMN, dan Kepala Sub Bagian yang ada di Kota Pekanbaru. Kuesioner penelitian diadopsi dari kuesioner yang telah digunakan peneliti-peneliti terdahulu.

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah menggunakan regresi linear berganda. Model ini dipilih karena penelitian ini dirancang untuk meneliti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun model persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah $Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$

Keterangan .

Y .*Fraud* (Kecurangan)

a . Konstanta

b₁₂₃. . Koefisien Regresi

x₁ .Penerapan Sistem Pengendalian Intern

x₂ .Implementasi*Good Corporate Governance*

x₃ . Ketaatan Aturan Akuntansi

e . Nilai eror

Analisis data dilakukan dengan bantuan program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 20.00 sebagai alat untuk meregresikan model yang telah dirumuskan diatas.

Uji Hipotesis

Uji t digunakan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh variable independen terhadap variabel dependen secara parsial.Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien t regresi dengan t

tabel sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Jika t hitung koefisien regresi lebih kecil dari t tabel, maka variabel independen secara individu tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, artinya hipotesis ditolak. Sebaliknya jika t hitung lebih besar dari t tabel, maka variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen, artinya hipotesis diterima.

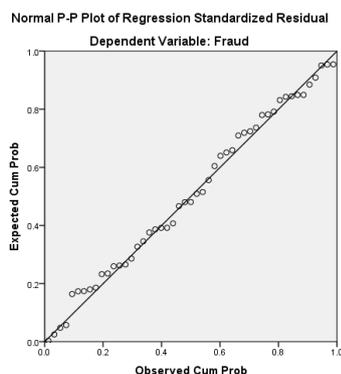
HASIL PENELITIAN

Uji Normalitas Data

Pengujian distribusi normal dilakukan dengan data normal atau mendekati normal. Pengujian distribusi normal dapat dilakukan dengan cara Pengujian *Probability Plot Residual*, *Grafik Histogram*, dan besarnya nilai *kolmogorov-smirnov*.

Pengujian normalitas melalui analisis grafik lainnya dilakukan dengan menganalisis grafik *probability plot of regression standardized residual*, yaitu dari harga-harga residual yang berdistribusi secara random dan terkumpul di sekitar garis lurus yang melalui titik nol maka residual berdistribusi normal.

Gambar 1
Grafik P-Plot



Sumber : Hasil Olahan Data 2015

Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah suatu keadaan dimana variabel lain (independen) saling berkorelasi satu dengan lainnya. Persamaan regresi berganda yang baik adalah persamaan yang bebas dari adanya multikolinieritas antara variabel independen. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur ada tidaknya variabel yang berkorelasi, maka digunakan alat uji atau deteksi *Variance Inflation Factor* (VIF). Dimana nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0.1.

Tabel 1
Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Implementasi GCG	.696	1.437
Pengendalian Intern Kas	.688	1.453
Ketaatan Aturan Akuntansi	.987	1.013

Sumber : Hasil Olahan Data 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa model regresi tidak mengalami gangguan multikolonieritas. Hal ini tampak pada nilai *tolerance* masing-masing variabel bebas yang lebih besar dari 0,1. Hasil penghitungan VIF juga menunjukkan bahwa nilai VIF masing-masing variabel bebas kurang dari 10.

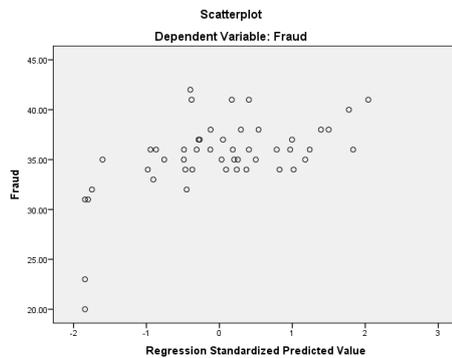
Uji Heterokedastisitas

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual, dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual, dari suatu pengamatan kepengamatan lainnya tetap, maka disebut

Homokedastisitas. Dan jika varians berbeda maka disebut heterokedastisitas.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit) pada grafik plot (*scatterplot*) antara nilai prediksivariabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).

**Gambar 2
Scatterplot**



Sumber : Hasil Olahan Data 2015

Dari grafik diatas menunjukkan tidak ada pola yang jelas dan menandakan terjadi heterokedastisitas untuk variabel penelitian, dengan demikian asumsi dasar bahwa variasi residual sama untuk semua pengamatan terpenuhi.

Uji Autokorelasi

Untuk menguji apakah terjadi autokorelasi dapat dideteksi dengan *Durbin-Watson statistics* (DW). Menurut Singgih (2004 : 218) jika angka *Durbin Watson* berkisar antara -2 sampai dengan +2 maka koefisien regresi bebas dari gangguan autokorelasi, sedangklan jika angka DW dibawah -2 berarti terdapat autokorelasi positif dan jika angka DW diatas +2 berarti terdapat autokorelasi negatif

**Tabel 2
Uji Autokorelasi**

Model	Durbin-Watson	Keterangan
1	1.334	Bebas Autokorelasi

Sumber : Hasil Olahan Data 2015
Hasil perhitungan menunjukkan harga DW untuk sebesar 1.334, yang berarti untuk Persepsi terletak pada rentang antara -2 sampai dengan +2, sehingga inferensi yang diambil adalah model regresi tidak mengandung gejala autokorelasi (Singgih, 2012;218).

Pengujian Model Regresi

Untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan dapat diterima atau tidak diketahui dengan membandingkan antara t_{hitung} dan t_{tabel} . Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dapat diterima. Sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka model regresi yang digunakan ditolak

**Tabel 3
Tabel Hasil Analisis Regresi**

Model		Coefficients ^a		
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	59.777	5.740	
	Pengendalian Intern Kas	-.093	.044	-.307
	Implementasi GCG	-.115	.088	-.279
	Ketaatan Aturan Akuntansi	-.173	.071	-.299

a. Dependent Variable: Fraud

Sumber : Hasil Olahan Data 2015

Dari hasil uji regresi tersebut, persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$F = 59.678 - 0.093GCG - 0.105IK + 0.173KAA + e$$

Pengujian Hipotesis Satu (X_1)

Pengendalian Intern Kas waktu diduga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi Fraud. perusahaan-perusahaan yang melaksanakan pengendalian intern akan mempermudah mengecek kecurangan yang terjadisehingga dapat mendeteksi kecurangan secara dini.

Berdasarkan hasil perhitungan regresi diperoleh koefisien regresi Pengendalian Intern Kas waktu sebesar -0.093 yang menunjukkan adanya pengaruh antara Pengendalian Intern Kasterhadap Fraud. Selain itu dengan signifikansi sebesar -0.042 < 0.05 menunjukkan adanya pengaruh negatif antara Pengendalian Intern Kas berpengaruh terhadap Fraud. Dilihat dari uji t :

$$\begin{aligned} t_{hitung} &= -2.097 \\ t_{tabel} &= 2.000 \\ t_{hitung} > t_{tabel} &= \text{Ha diterima,} \end{aligned}$$

H0 ditolak

Dari hasil pengujian menunjukkan t_{hitung} -2.079 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2.000 dan p value sebesar 0.042 < 0.05. hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara Pengendalian Intern Kas terhadap *Fraud*. Semakin baik penganggaran Pengendalian Intern Kas yang dibuat oleh KAP akan mempengaruhi semakin efektifnya masa audit dan Fraud yang dihasilkan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengendalian intern kas berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Semakin baik pengendalian intern kas maka tindak

kecurangan (*fraud*) akan semakin merendah.

Pengujian Hipotesis Dua (X_2)

Berdasarkan hasil perhitungan regresi diperoleh koefisien regresi sebesar -0.115 dengan signifikansi sebesar 0.016 < 0.05 menunjukkan adanya pengaruh negatif antara Implementasi GCG terhadap Fraud. Dilihat dari uji t :

$$\begin{aligned} t_{hitung} &= -2.479 \\ t_{tabel} &= 2.000 \\ t_{hitung} > t_{tabel} &= \text{Ha ditolak,} \end{aligned}$$

H0 diterima

Dari hasil pengujian menunjukkan t_{hitung} -2.479 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2.000 dan p value sebesar 0.016 < 0.05. hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara GCG terhadap Fraud. Prinsip tersebut dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan secara keseluruhan karena penerapan GCG yang berjalan dengan baik akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang jauh dari praktik kecurangan. Hasil Penelitian membuktikan bahwa GCG berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*).

Pengujian Hipotesis Tiga (X_3)

Berdasarkan hasil perhitungan regresi diperoleh koefisien Ketaatan Aturan Akuntansi sebesar -0.173 yang menunjukkan adanya pengaruh antara ketaatan aturan akuntansi terhadap *Fraud*. Untuk mengetahui perbandingan tidak signifikansi variabel Ketaatan Aturan Akuntansi, hasil uji t diperoleh sebagai berikut :

$$\begin{aligned} t_{hitung} &= -2.432 \\ t_{tabel} &= 2.000 \\ t_{hitung} > t_{tabel} &= \text{Ha diterima,} \end{aligned}$$

H0 ditolak

Dari hasil pengujian menunjukkan t_{hitung} -2.432 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2.000 dan p value sebesar 0.019. hal ini menunjukkan

bahwa ada pengaruh antara Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Fraud. Hasil penelitian membuktikan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa baik suatu model yang digunakan dapat menjelaskan variabel dependennya. Apabila R^2 bernilai 0 maka dikatakan tidak ada variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh hubungan tersebut, dan jika R^2 bernilai 2 maka dikatakan variasi variabel dependen dapat dijelaskan secara penuh oleh model yang digunakan. Dengan demikian R^2 bernilai antara 0 dan 1. Untuk regresi dengan variabel independen lebih dari 2, digunakan adjusted R^2 sebagai koefisien determinansi.

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b			
Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.582 ^a	.375	.293

Sumber : Data Olahan, 2015

Hasil perhitungan analisis regresi pada Tabel diatas diperoleh R^2 sebesar 0.375. Dengan demikian variabel dapat menjelaskan variabel Implementasi GCG, Pengendalian Intern Kas dan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh sebesar 37.5%. Sedangkan sisanya 62.5 % dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak teramati dalam penelitian ini seperti, moralitas individu, etika organisasi, keadilan organisasi dan lain sebagainya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis data dalam pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1) Hipotesis pertama menunjukkan bahwa Pengendalian Intern Kas waktu berpengaruh negatif terhadap *Fraud*. Hal ini di buktikan dengan koefisien sebesar -0.093 dengan signifikan $0.042 < 0.05$. Uji t menunjukkan bahwa $-2.097 > 2.000$. Hal ini menunjukkan bahwa Pengendalian Intern Kas berpengaruh terhadap *Fraud*. 2) Hipotesis kedua menunjukkan bahwa Implementasi GCG berpengaruh negatif terhadap *Fraud*. Hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi sebesar -0.115 dengan signifikan $0.016 < 0.05$. Uji t menunjukkan bahwa $-2.479 > 2.000$. Hal ini menunjukkan bahwa Implementasi GCG berpengaruh terhadap *Fraud*. 3) Hipotesis tiga menunjukkan bahwa Ketaatan Aturan Akuntansi berpengaruh negatif terhadap *Fraud*. Hal ini di buktikan dengan koefisien regresi sebesar -0.173 dengan signifikan $0.019 < 0.05$. Uji t menunjukkan bahwa t tabel $-2.432 > 2.000$. Hal ini menunjukkan bahwa Pengendalian Intern Kas berpengaruh terhadap *Fraud*. 4) Hasil perhitungan R^2 sebesar 0.375. Dengan demikian variabel dapat menjelaskan variabel Implementasi GCG, Pengendalian Intern Kas waktu dan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh sebesar 37.5%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak teramati dalam penelitian ini seperti, moralitas individu, etika organisasi, keadilan organisasi dan lain sebagainya.

Saran

Peneliti berikutnya dapat melakukan penelitian diprovinsi lain khususnya diluar pulau Sumatera, sehingga nantinya hasil bisa digeneralisasi untuk lingkup yang lebih luas serta mencantumkan waktu pengembalian kuesioner.

Peneliti selanjutnya dapat lebih maksimal memperoleh data kuesioner yang baik, bila perlu mengunjungi BUMN secara langsung karena tingkat pengembaliannya lebih jelas dan dapat dipantau secara langsung.

Peneliti selanjutnya disarankan menambah variabel penelitian lainnya yang dapat mempengaruhi *Fraud* dengan menambah atau mengganti variabel selain ketiga variabel yang diteliti sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2003. *Auditing (Jilid 1)*. Yogyakarta. UPP AA YKPN
- Adelin, 2013. Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Perilaku Tidak Etis terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada BUMN di Kota Padang)
- Agoes, Sukrisno dan I Cenik Ardana. 2009. *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta. Salemba Empat
- Eddi Wibowo, Tomo HS dan Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2004 *Memahami Good Government Governance & Good Corporate Governance*, Jakarta. YPAPI, 2004
- Husna, Fitriatil. 2013. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Kas dan Implementasi *Good Corporate Governanc* terhadap Kecurangan (Studi Empiris pada Perusahaan BUMN Di Kota Padang). Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Mulyadi. 2002. *Auditing*. Salemba 4, Jakarta
- Kurniawati, Endang. 2012. "Analisis experiential marketing terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan (Studi pada BBC Gazebo Cafe Jember)". Jember. Skripsi.
- Pristiyanti, I. R. 2012. Persepsi Pegawai Instansi Pemerintahan Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Fraud* di Sektor Pemerintahan. *Accounting Analysis Journal*, ISSN 2252-6765
- Rahmawati, A. P., & Soetikno, I. 2012. Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Moralitas Manajemen terhadap Kecenderungan Akuntansi (Studi pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang). Artikel Universitas Diponegoro.
- Siti, Thoyibatun. 2009. Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Perilaku Tidak

Etis dan Kecenderungan
Kecurangan Akuntansi.
Jurnal Ekonomi dan
Keuangan.

Sugiyono. 2012. Statistika Untuk
Penelitian. Bandung. CV.
Alfabeta.

Sukanto, Eman.2007. Perbandingan
Persepsi antara Kelompok
Auditor Internal, Akuntan
Publik, dan Auditor
Pemerintah terhadap
Penugasan Audit
Kecurangan (*Fraud Audit*)
dan Profil Auditor
Kecurangan (*Fraud
Auditor*).
Thesis.Semarang.UNDIP.

Tunggal, A.W 2012, Pedoman
Pokok *Operational
Auditing*, Harvindo, Jakarta

Wilopo.2006. Analisis Faktor-Faktor
yang Berpengaruh terhadap
Kecenderungan
Kecurangan
Akuntansi.Studi pada
Perusahaan Publik dan
Badan Usaha Milik Negara
di Indonesia. Simposium
Nasional Akuntansi IX,
Padang , 21-69

(<http://www.riaupos.co/>).

(<http://www.riauaksi.com/berita/berita-24913-hukuman-untuk-mantan-manager-pt-waskita-karya-dinilai-terlalu-ringan.html>, posted on 12 September 2014, 18.50.09)

<http://riautekini.com/hukum.php?array=65303>
posted on 7 Oktober 2013, 15.54)